

**REORIENTASI TARGET DAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN MBG UNTUK
PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PROGRAM MBG**

**TARGET REORIENTATION AND INSTITUTIONAL RESTRUCTURING OF THE
FREE NUTRITIOUS MEAL (MBG) PROGRAM FOR ENHANCED EFFICIENCY AND
EFFECTIVENESS**

Syahril

Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan lebih dari setahun tanpa evaluasi menyeluruh dari pemerintah, meskipun anggarannya yang sangat besar mencapai Rp 335 triliun pada tahun 2026. Tulisan ini menganalisis tiga permasalahan mendasar dari program MBG. Pertama, dari sisi anggaran, program ini menimbulkan ketimpangan dan friksi sosial karena dananya banyak dialihkan dari anggaran pendidikan, sementara gaji tenaga pendidik honorer jauh lebih rendah dibandingkan gaji pekerja di MBG. Kedua, dari sisi konsep, terdapat kekeliruan desain antara latar belakang masalah dan penerima manfaat. MBG yang ditujukan untuk mengatasi stunting pada Balita (4,48 juta jiwa) justru diberikan kepada 82,9 juta anak usia sekolah, sehingga tidak tepat sasaran. Ketiga, dari sisi efektivitas, bukti ilmiah menunjukkan bahwa intervensi gizi hanya efektif jika diberikan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak janin hingga anak berusia 2 tahun. Pemberian makan pada anak usia sekolah, yang telah melewati masa kritis tersebut, dinilai tidak efektif dan tidak efisien dalam menangani stunting. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan kepada presiden agar program MBG dievaluasi secara mendasar dan diarahkan kembali untuk menyasar ibu hamil dan Balita di bawah 2 tahun agar tepat sasaran, efektif, dan adil secara anggaran. Selain itu, desain kelembagaan dalam implementasi program MBG disarankan untuk diserahkan sepenuhnya ke Kementerian Kesehatan yang selama ini telah berpengalaman melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Kata Kunci: makan bergizi gratis, stunting, anggaran pendidikan, 1000 HPK, kelembagaan.

ABSTRACT

The Free Nutritious Meals program (Program Makan Bergizi Gratis - MBG) has been implemented for over a year without a comprehensive government evaluation, despite its massive budget of IDR 335 trillion in 2026. This analysis identifies three fundamental flaws in the MBG program. First, regarding financing, the program has created social disparity and friction as it is largely funded by reallocating the education budget, while the salaries of honorary teachers remain significantly lower than those of MBG workers. Second, from a design perspective, there is a critical flaw in targeting. Although the program's stated goal is to reduce stunting in toddlers (4.48 million children), the beneficiaries are 82.9 million school-age children, making it misdirected. Third, in terms of effectiveness, scientific evidence confirms that nutritional interventions are only effective if provided during the first 1,000 Days of Life (from conception to age two). Providing meals to school-age children, who have passed this critical window, is proven to be an ineffective and inefficient method for tackling stunting. Therefore, this paper recommends that the President conduct a fundamental evaluation of the Free Nutritious Meal (Makan Bergizi Gratis – MBG) program and reorient its focus toward pregnant women and children under two years of age to ensure it is well-targeted, effective,

and fiscally equitable. Furthermore, it is recommended that the institutional design for the implementation of the MBG program be fully delegated to the Ministry of Health, given its extensive experience in executing the Supplementary Feeding Program (PMT)."

Keywords: *free nutritious meals, stunting, education budget, first 1000 days, institutional.*

A. Pendahuluan

Setelah lebih dari setahun program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan, pemerintah sepertinya tak banyak melakukan evaluasi, sehingga mengindikasikan tidak banyak perubahan yang berarti untuk memperbaiki program ini. Jika pemerintah memutuskan untuk mengubah APBN karena efek dari perang di Timur Tengah, seharusnya ini menjadi momentum melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap ide dan implementasi MBG. Program ini tak hanya menguras APBN, tapi juga menimbulkan efek negatif yang tidak diinginkan (*unintended consequences*) di tengah masyarakat.

Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp. 335 triliun untuk MBG. Anggaran tersebut diambil sebagian besar dari dana pendidikan. Beberapa kelompok masyarakat sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena MBG menyedot sepertiga dari total anggaran pendidikan (BBC News Indonesia, 2026). Karena komponen program MBG masuk di bagian belanja pendidikan, sebagian masyarakat, terutama yang bekerja sebagai tenaga pendidik, merasa kebijakan alokasi anggaran dalam program MBG tidak adil. Mayoritas guru honorer yang bertahun-tahun mengabdikan menerima honor rendah, kisaran dari Rp. 300.000 hingga Rp.1 juta, dan dibayar per tiga bulan, bergantung dari besaran dana BOS yang didapatkan sekolah. Sementara karyawan SPPG level Supervisor/Kepala Dapur dibayar Rp.4 – Rp.7 juta/bulan, juru masak/koki digaji Rp.2,5 – Rp.5 juta/bulan, dan Staf Operasional (packing/pencuci piring/pengantar) membawa pulang Rp.2- Rp.4,5 juta/bulan. Ini menimbulkan ketimpangan dan friksi antara tenaga

pendidik dan pekerja SPPG (Napitupulu, 2026).

Desakan masyarakat untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap program MBG semakin intens karena ada banyak penelitian yang menemukan bahwa semua tujuan yang ditetapkan pemerintah dalam program MBG sebagian besar tidak tercapai. Hal ini bukan soal waktu studi dan implementasi yang masih terlalu dini, tapi temuan berbagai penelitian menggambarkan bahwa program MBG tak hanya bermasalah dari sisi implementasi, tapi juga bermasalah pada tataran konsep/ide.

1. MBG dan Penanggulangan Stunting

Latar belakang masalah dari program MBG adalah kekurangan gizi atau stunting. Dalam Nota Keuangan APBN 2026 dan penjelasan Presiden di berbagai media, alasan utama MBG dibuat untuk menyelesaikan permasalahan gizi di Indonesia, terutama pada anak usia sekolah (Kementerian Keuangan, 2025). Alasan itu punya dasar teknokratik yang kuat sebab data Kementerian Kesehatan mencatat tahun 2025 ada 19,8% anak Balita di Indonesia mengalami stunting. Namun yang keliru dari program ini karena latar masalah dan desain programnya (penerima manfaatnya) berbeda. Jika yang menjadi alasan utama program MBG adalah anak kurang gizi atau stunting (Balita) yang mencapai 19,8% atau sekira 4.482.340 jiwa, mengapa penerima manfaatnya seluruh anak usia sekolah, bukan spesifik ke Balita yang mengalami stunting. Pemerintah bahkan menambah target penerima manfaat MBG tahun 2026 menjadi 82,9 juta atau 18,5 kali lebih besar dari jumlah Balita Stunting. Kekeliruan

desain penerima manfaat ini membuat alokasi anggaran program ini membesar tapi tidak menyentuh masalah mendasar dan menjadi masalah utama yang menyebabkan munculnya masalah turunan seperti alokasi anggaran yang sangat kecil per porsi makanan, kualitas makanan yang justru tak bergizi (keracunan), dll.

Pemberian MBG kepada seluruh anak sekolah (SD, SMP, SMA) (Perpres No. 115 Tahun 2025) tak hanya keliru dalam penargetan, tapi tidak efektif menyelesaikan masalah. Dalam temuan berbagai studi tentang stunting, pemberian makan tambahan hanya akan efektif jika diberikan pada periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Periode 1.000 HPK merupakan periode kritis dalam siklus kehidupan manusia yang dihitung sejak masa konsepsi (pembentukan janin dalam kandungan) selama kurang lebih 270 hari, dilanjutkan hingga anak mencapai usia 2 tahun (730 hari). Stunting (gagal tumbuh) terjadi akibat gangguan kronis yang dimulai sejak pembuahan hingga usia 2 tahun, dimana sekitar 20-30% stunting terjadi saat masih dalam kandungan dan sebagian besar kekurangan tinggi badan, sisanya terjadi sebelum usia 24 bulan (Benjamin-Chung et al., 2023; Gabain et al., 2023; Mertens et al., 2023). Jika MBG diberikan setelah melewati masa 1.000 HPK, apalagi saat usia anak sudah belasan tahun, efeknya lebih kecil dan lebih lambat (Karlsson et al., 2023; Mertens et al., 2023). Jika seperti itu, program MBG saat ini bisa disebut tidak efektif dan efisien.

2. Target dan Kalkulasi Anggaran MBG

Target program MBG seharusnya diarahkan pada ibu hamil dan Balita sebelum berusia 2 tahun karena inilah periode 1.000 HPK. Merujuk pada website Kemenko PMK, jumlah anak kurang gizi atau stunting (Balita) yang mencapai 19,8% atau sekira 4.482.340 jiwa (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, 2025). Karena pemerintah akan terus mengintervensi, maka alih-alih bertambah, target penerima

MBG seharusnya terus berkurang karena ada perbaikan gizi sehingga membuat balita yang sebelumnya stunting membaik kondisinya.

Jika pemerintah memfokuskan target penerima manfaat MBG hanya untuk Balita stunting, maka alokasi anggaran Rp. 335 triliun tahun 2026 sangat berlebihan. Dengan asumsi jumlah Balita stunting sebanyak 4.482.340 jiwa dan biaya per porsi anak dialokasi Rp. 100.000, maka pemerintah hanya perlu anggaran Rp. 448,23 miliar saja. Angka Rp. 100.000 per porsi makan sudah sangat memadai menyajikan makanan yang benar-benar bergizi.

Saat ini, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran per porsi sebesar Rp. 10.000 yang berlaku di semua daerah. Ada dua ketidakrasionalan angka tersebut. Pertama angka Rp. 10.000 secara nominal tidak memadai untuk menyajikan makan bergizi. Studi global memperkirakan bahwa biaya minimum untuk pola makan sehat yang memenuhi kebutuhan gizi adalah sekitar US\$2–4 per orang per hari di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Bahkan untuk pola makan termurah yang mampu memenuhi kebutuhan energi dan 20 jenis zat gizi, biaya rata-rata (median) globalnya adalah US\$2,32 per hari pada tahun 2017 (Bai et al., 2022; Gupta et al., 2021). Jika angka tersebut dikonversi ke dalam rupiah, maka estimasi biaya per porsi makan bergizi berada di kisaran Rp. 33.750-Rp. 67.500 (asumsi \$1 setara Rp. 16.875). Wajar saja, jika program MBG ini tidak berdampak terhadap perbaikan gizi, berdasarkan studi (Wahyudi Askar et al., 2025), dan justru menyebabkan keracunan di berbagai daerah.

Ketidakrasionalan kedua dari alokasi anggaran Rp.8.000–Rp.10.000 per porsi karena diseragamkan seluruh daerah. Menyamaratakan anggaran per porsi untuk semua daerah jelas tidak tepat karena inflasi, khususnya inflasi pangan bisa berbeda-beda tiap daerah. Berdasarkan data

BPS yang dikutip oleh Majalah Tempo, Dari total 38 provinsi, sebanyak 28 provinsi mengalami inflasi, sementara 10 lainnya mengalami deflasi per Oktober 2025 (Tempo, 2025). Daerah-daerah yang mengalami inflasi, dipicu salah satunya oleh kenaikan harga pangan. Jika alokasi anggaran per porsi makanan sama rata di semua daerah, maka jelas ada ketidakadilan.

3. Kelembagaan MBG

Latar belakang masalah munculnya program MBG ini adalah masalah kesehatan, spesifik mengenai masalah kekurangan gizi. Seharusnya untuk merealisasikan program ini, pemerintah menyerahkan sepenuhnya ke Kementerian Kesehatan, bukan membentuk lembaga baru yang jelas membuat “gemuk” struktur pemerintahan, ditambah BGN merekrut PPPK sebanyak 32.000 orang untuk menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) per 1 Februari 2026. Ini akan menjadi bom waktu jika program ini tidak dibenahi sejak awal karena akan lebih sulit nantinya memberhentikan pegawai jika program diperbaiki dalam jangka panjang.

Menyerahkan pelaksanaan operasional MBG ke lembaga baru tak hanya membuat struktur pemerintahan inefisien, tapi juga tak efektif. BGN sebagai lembaga penanggung jawab program MBG tak punya instrumen yang terlatih di hingga level daerah dan desa. Dalam operasionalnya, pelaksanaan program MBG akhirnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, bahkan melibatkan TNI-POLRI. Keterlibatan ini menciptakan birokrasi hibrida sipil-militer (*civil-military hybrid bureaucracy*) yang melemahkan profesionalisme serta meritokrasi institusi sipil. Bukanya menguatkan transparansi, beberapa yayasan pengelola dapur MBG yang berafiliasi dengan TNI-POLRI justru mendapatkan keistimewaan berupa pengecualian dari pemeriksaan transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK (Wahyudi Askar et al., 2025).

B. Rekomendasi Kebijakan

1. Memperbaiki Target Penerima Manfaat

Penerima manfaat bisa ditentukan entitasnya jika masalah kebijakan sudah terdefinisikan dengan jelas. Definisi masalah kebijakan menuntut pengambil kebijakan untuk menyusun kriteria operasional tentang siapa penerima manfaat yang ingin disasar. Dalam konteks program MBG, definisi masalah kebijakannya jelas ingin menyelesaikan stunting. Itu sebabnya fokus target penerima manfaat diarahkan pada entitas yang berkaitan dengan penanggulangan stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak Balita. Hasil kalkulasi (Askar et al., 2025) mengestimasi menggunakan skema lebih terarah (*targeted approach*), kebutuhan anggaran per tahun untuk membiayai MBG hanya sebesar Rp.117 ,93 triliun, lebih efisien, tepat sasaran, berdampak, dibandingkan skema pemerintah yang menghabiskan anggaran hingga Rp.400 triliun, tetapi sebagian anggaran dinikmati anak-anak dari keluarga kaya.

2. Mengubah Kelembagaan

Pelaksanaan program MBG tak membutuhkan lembaga pemerintah yang baru, karena program ini seharusnya diurus oleh Kementerian Kesehatan. Relevansi program ini dengan Kementerian Kesehatan karena latar masalahnya adalah masalah kesehatan, yaitu kekurangan gizi. Sebelum program ini menjadi lebih *crowded*, pemerintah sebaiknya mengalihkan urusan pelaksanaan MBG ke Kementerian Kesehatan dan membubarkan BGN.

Karena selama hampir dua tahun dijalankan, program MBG sudah melibatkan banyak pihak, terutama SPPG dan SPPI, maka transisi kelembagaan butuh strategi. Pertama, BGN harus menyelesaikan semua kontrak dengan pihak dapur setidaknya hingga tahun 2026, dengan memenuhi semua bisnis kedua belah pihak agar tidak menimbulkan

kerugian signifikan. Setelah kontrak dengan SPPG selesai, penyediaan makanan bergizi diserahkan sepenuhnya ke Kementerian Kesehatan mengikuti mekanisme pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Setelah transisi dari BGN ke Kementerian Kesehatan selesai, BGN dibubarkan. Kedua, terkait SPPI yang terlanjur direkrut, mereka bisa diperbantukan di Kementerian Kesehatan untuk implementasi program makan bergizi.

Setelah dialihkan ke Kementerian Kesehatan, program ini bisa diimplementasikan tanpa mekanisme pelibatan pihak ketiga. Kementerian Kesehatan punya jejaring dari level daerah hingga tingkat desa melalui Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten/kota, dan Puskesmas. Puskesmas harus diletakkan sebagai instrumen strategis pelaksanaan MBG karena selama bertahun-tahun Indonesia berlutut dengan isu stunting, Puskesmas sudah menunjukkan peran pentingnya melalui pemantauan status gizi balita (pengukuran TB/U, pemantauan riwayat penyakit, infeksi, dan sanitasi) serta penentuan intervensi gizi spesifik dan sensitif (Picauly et al., 2023), sebagai pusat pendidikan gizi, pola asuh, dan dukungan menyusui (Siboro et al., 2020), dan melakukan pemberdayaan kader dan kolaborasi interprofesional dalam penanggulangan stunting (Sufri et al., 2023).

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Bai, Y., Herforth, A., & Masters, W. A. (2022). Global variation in the cost of a nutrient-adequate diet by population group: an observational study. *The Lancet Planetary Health*, 6(1), e19–e28. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(21\)00285-0](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00285-0)
- Benjamin-Chung, J., Mertens, A., Colford, J. M., Hubbard, A. E., van der Laan, M. J., Coyle, J., Sofrygin, O., Cai, W., Nguyen, A., Pokpongkiat, N. N., Djajadi, S., Seth, A., Jilek, W., Jung, E., Chung, E. O., Rosete, S., Hejazi, N., Malenica, I., Li, H., ... Yori, P. P. (2023). Early-childhood linear growth faltering in low- and middle-income countries. *Nature*, 621(7979), 550–557. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06418-5>
- Gabain, I. L., Ramsteijn, A. S., & Webster, J. P. (2023). Parasites and childhood stunting – a mechanistic interplay with nutrition, anaemia, gut health, microbiota, and epigenetics. In *Trends in Parasitology* (Vol. 39, Number 3, pp. 167–180). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.pt.2022.12.004>
- Gupta, S., Vemireddy, V., Singh, D. K., & Pingali, P. (2021). Ground truthing the cost of achieving the EAT lancet recommended diets: Evidence from rural India. *Global Food Security*, 28. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100498>
- Karlsson, O., Kim, R., Moloney, G. M., Hasman, A., & Subramanian, S. V. (2023). Patterns in child stunting by age: A cross-sectional study of 94 low- and middle-income countries. *Maternal and Child Nutrition*, 19(4). <https://doi.org/10.1111/mcn.13537>
- Mertens, A., Benjamin-Chung, J., Colford, J. M., Coyle, J., van der Laan, M. J., Hubbard, A. E., Rosete, S., Malenica, I., Hejazi, N., Sofrygin, O., Cai, W., Li, H., Nguyen, A., Pokpongkiat, N. N., Djajadi, S., Seth, A., Jung, E., Chung, E. O., Jilek, W., ... Yori, P. P. (2023). Causes and consequences of child growth faltering in low-resource settings. *Nature*, 621(7979), 568–576. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06501-x>

Picauly, I., Mirah Adi, A. A. A., Meiyetrian, E., Mading, M., Weraman, P., Nashriyah, S. F., Hidayat, A. T., Adeline Boeky, D. L., Lobo, V., Saleh, A., & Peni, J. A. (2023). Path analysis model for preventing stunting in dryland area island East Nusa Tenggara Province, Indonesia. *PLoS ONE*, 18(11 November).

Siboro, V. A., Rochadi, K., Sinaga, J., Manurung, K., & Bancin, D. (2020). The Relationship of Knowledge, Parenting Patterns, Feeding, and Environmental Sanitation to the Incidence of Stunting in Toddler Ages 24-59 Months in the Working Area of the Buhit Puskesmas, Samosir District, 2025. *JPS*, 2025(3), 2107–2117.

Sufri, S., Nurhasanah, Jannah, M., Dewi, T. P., Sirasa, F., & Bakri, S. (2023). Child Stunting Reduction in Aceh Province: Challenges and a Way Ahead. *Maternal and Child Health Journal*, 27(5), 888–901. <https://doi.org/10.1007/s10995-023-03601-y>

Buku

Kementerian Keuangan. (2025). *Buku II Nota Keuangan Tahun 2026*. Kementerian Keuangan.

Website

BBC News Indonesia. (2026, January). *Anggaran MBG Sebesar Rp335 Triliun Digugat Ke MK Karena “Memakan” Sepertiga Dana Pendidikan – Seberapa Mungkin Dikabulkan Hakim?* BBC News Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. (2025). *Prevalensi Stunting tahun 2024 Turun Jadi 19,8 Persen, Pemerintah Terus Dorong Penguatan Gizi Nasional*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.

Napitupulu, E. L. (2026, January). *Nasib Guru PPPK Paruh Waktu Vs Pegawai MBG*. Kompas.

Tempo. (2025). *Daftar Daerah dengan Inflasi Tertinggi pada Oktober 2025*. Tempo

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183

Laporan

Askar, M. W., Fikri, B., Darmawan, J., Muhammad, G. D., & Setiadi, B. M. (2025). *Pak Presiden, Kami Punya Ide Lain; Pemangkasan Anggaran Untuk Keadilan Fiskal dan Kesejahteraan Rakyat*.

Wahyudi Askar, M., Hidayah, I., Fikri, B., Darmawan, J., Lianasari, A., Muhammad, G. D., & Rizky Dwi Lestari, dan. (2025). *MAKAN (TIDAK) BERGIZI (TIDAK) GRATIS*. www.celios.co.id